

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.

Satu satunya negara di dunia yang memasukkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, dalam UUD negaranya, barangkali hanyalah Indonesia. Namun sangat miris dan memprihatinkan memang, bahwa apa yang diyakini dan dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 itu, belum mampu menunjukkan “kemujaraban”nya sebagai soko guru perekonomian, dan menopang pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal, maupun nasional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa ada beberapa koperasi yang berhasil. Namun dibandingkan dengan upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam jangka waktu yang tidak singkat, hasilnya masih sangat jauh dari harapan. Mungkin atas dasar fakta “kegagalan” koperasi Indonesia inilah, mengapa Presiden RI menyampaikan arahan bahwa mulai tahun 2012, revitalisasi koperasi menjadi salah satu program utama pemerintah untuk menunjang perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Mantan menteri koperasi RI, mengakui ada 6 masalah mendasar dalam tubuh Koperasi di Indonesia, yaitu 1). “Citra”, 2).“Kemandirian”, 3).“Kualitas SDM”, 4).“Manajemen yang tidak transparan dan akuntabel/*Governance*”, 5).“Ketersediaan dan Akses Permodalan”, dan 6.) “Jaringan Usaha” (Suryadharma Ali, 2004). Ungkapan yang disampaikan oleh Suryadharma Ali (sebagai mantan menteri koperasi) tentu bukanlah pepesan kosong! Keenam butir permasalahan diatas, adalah juga cermin masalah koperasi di kota Medan.

Pada tahun 2008 dan 2009, Pemerintah c/q Kementrian koperasi melakukan survey Identifikasi Perkembangan Bantuan Perkuatan kepada Koperasi dan UMKM, atas program dan dana bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah untuk tahun anggaran 2000-2007. Pada waktu itu, saya, Karlonta, sebagai Koordinator survey untuk Propinsi Sumatera Utara, menemukan fakta, memang ke-enam butir itu ditemukan dilapangan, termasuk kota Medan. Bahkan tidak sedikit koperasi yang hanya ada untuk sesaat. Artinya, koperasi dibentuk dengan memenuhi syarat badan hukum yang diminta, (untuk mendapatkan bantuan), tetapi ketika dana telah turun, koperasi tidak pernah punya kegiatan sama sekali. Dengan fakta yang demikian, saya berpendapat, ada yang salah dengan seleksi koperasi yang layak menerima bantuan dana maupun aset dari program yang digulirkan Pemerintah. Disamping itu, kami

juga menemukan fakta bahwa mulai dari penerimaan bantuan, sampai pertanggung jawaban dana/barang yang diterima bantuan sangat tidak akuntabel.

Menurut Soetrisno (2002) penyebab kegagalan koperasi di Indonesia, adalah, karena pemerintah membangun koperasi dengan tiga pola penitipan kepada program, yaitu: (1). Koperasi untuk pembangunan sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (2). Koperasi untuk mendukung program pemerintah berbasis sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Ketika program tersebut gagal, maka koperasi harus memikul beban kegagalan program. (3) Koperasi fungsional pada lembaga pemerintah/swasta, (koperasi pegawai negeri maupun koperasi karyawan /swasta), dan koperasi fungsional lainnya. Keadaan ini diperburuk oleh sangat lemahnya penegakan hukum, atas pelanggaran baik terhadap Undang undang, Peraturan Menteri, AD-ART Koperasi, dan regulasi lainnya.

Tidak sedikit penelitian tentang pemberdayaan koperasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Para peneliti sebelumnya, umumnya berfokus pada “Hardware”, seperti; kualitas produk koperasi, akses permodalan, jaringan usaha, dan marketing, dan ada juga yang meneliti kualitas kepengurusan koperasi. Tentu saja fokus penelitian itu sangat baik, namun berdasarkan pengalaman kami pada survey perkuatan kepada koperasi, masalah yang tidak kalah penting, sesungguhnya terletak pada Komitmen SDM, untuk bertindak bersih, dan sesuai aturan, baik di internal maupun eksternal koperasi.

Oleh karena itu, penelitian kami kali ini terutama berfokus pada masalah “Brain ware”, dalam Revitalisasi koperasi. Yang kami maksud dengan “Brainware”, bukan hanya masalah Kompetensi dan Kapabilitas, tetapi yang tidak kalah penting adalah **Integritas dan Komitmen** yang kuat dari semua pihak, baik Pengurus koperasi, Pemerintah, maupun Anggota, untuk bertindak tegas, jujur, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Semua variabel diatas jika dilakukan dengan Komitmen yang kuat kami yakini, dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah, akan mampu memicu pertumbuhan koperasi yang bersih. Komitmen adalah ujung tombak Good Cooperative Governance (Priambodo 2012). Sejalan dengan arah penelitian kami, maka kami tidak akan meneliti masalah kelima (aspek modal) dan masalah ke enam (jaringan usaha).

Sesuai dengan fokus penelitian kami, yaitu masalah GCG dan eksternal KSF, dimana Pemerintah adalah bagian dari eksternal Key Succes Faktor, maka yang menjadi Objek (target) penelitian ini:

1. Pengurus Koperasi, dengan modal swadaya, dan Koperasi yang selain memiliki modal sendiri, juga yang menerima bantuan dari pemerintah, baik dana maupun barang, dan atau bantuan fasilitas dan softskill lainnya, dengan tidak mempersoalkan jenis usaha.
2. Selain Koperasi, objek penelitian pihak Eksternal koperasi mencakupi:
 - a. Anggota koperasi,
 - b. Pemerintah (c/q dinas koperasi),

1.2 Identifikasi Permasalahan dalam usaha Revitalisasi Koperasi.

Berdasarkan fakta lapangan dan hasil survey, maupun penelitian sebelumnya, permasalahan dalam Revitalisasi Koperasi di Indonesia adalah:

1. Pengelolaan Koperasi yang tidak berpegang pada Jatidiri Koperasi, menyebabkan *tidak tercipta Good Cooperative Governance*, yang menimbulkan tidak terciptanya manajemen yang Transparan dan Akuntabel dalam tubuh koperasi, yang kemudian memicu timbulnya saling tidak percaya antar pihak yang terkait.
2. Kurangnya *Komitmen* semua pihak terkait (pengurus, Anggota, Pemerintah untuk mendukung kemajuan Koperasi, yang dipicu oleh masalah1.
3. “Kurangnya” Political will Pemerintah untuk sungguh sungguh membangun Koperasi dan ekonomi rakyat, khususnya dalam penegakan hukum (Law Encorcement), ketika ada penyelewengan dalam tubuh koperasi

Fakta lapangan tentang pengelolaan koperasi di Indonesia, ke-empat masalah yang akan diteliti, sesungguhnya saling terkait satu sama lain, dengan ulasan dan uraian sebagai berikut:

Pertama, masalah Citra koperasi. Masalah “citra “ koperasi, pada dasarnya timbul karena ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus, maupun pemerintah, karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, berkaitan dengan: a) dana yang digulirkan pemerintah, dan pertanggung jawabannya, b). Peran Dinas koperasi sebagai pembina, yang tidak jelas (Nenny Nababan, 2009).

Kedua, masalah “kemandirian” koperasi yang tidak bertumbuh dalam memajukan koperasi, sifatnya lebih kompleks, karena masalah “kemandirian” umumnya disebabkan oleh: (a). adanya program titipan pemerintah melalui koperasi, sehingga koperasi kehilangan kemandirian dan jati dirinya (Sularso 2006). (b). Terkooptasinya anggota koperasi oleh program “manja” pemerintah itu sendiri. Artinya, mereka hanya berharap bahwa dengan ikut koperasi, dapat uang, dapat pinjaman, dapat modal (Rioka). (c) Banyaknya koperasi fungsional, dimana pengurus dan anggota hampir tidak berperan aktif. (d) Kuatnya campur tangan pemerintah dalam memberikan penilaian koperasi berprestasi (Sularso 2006).

Ketiga, masalah kualitas SDM. Masalah SDM pengelola (internal) koperasi, khususnya di kota Medan, bukan hanya masalah kompetensi dan kapabilitas, tetapi yang lebih penting lagi adalah berkaitan dengan **Komitmen** setiap individu baik dari internal maupun eksternal koperasi, agar bertindak dengan sikap moral yang bersih bersih. Masalah SDM di internal koperasi, juga memiliki efek langsung Komitmen SDM di luar (eksternal) koperasi, (seperti Anggota, Pemerintah, dan Mitra koperasi, juga tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan peran masing masing dengan baik.

Keempat, adalah masalah manajemen yang tidak transparan dan tidak Akuntabel/Good Governance. Transparansi dan akuntabilitas, adalah bagian yang harus dimiliki oleh pengelolaan yang bersih; jika keduanya tidak ada, maka tidak diragukan bahwa Good Governance memang tidak ada dalam tubuh koperasi.

Dari hasil penelusuran yang kami lakukan, (tim peneliti), **kami belum menemukan penelitian yang mencoba menganalisa pemberdayaan /revitalisasi koperasi**, (yang mengarah pada peningkatan sosial trust antar pihak yang berkepentingan), **dari sudut Good Cooperative Governance (GCG), sekaligus dengan eksternal Key Succes Faktor**. Hasil penelusuran kami ini didukung hasil meta riset Ida dan Lugina (2010), yang menyimpulkan, bahwa “...tidak satupun rekomendasi yang mengarah pada peningkatan social trust dikalangan anggota, antar lembaga, bahkan masyarakat sekitar. Untuk konteks koperasi, social trust sangat diperlukan, mengingat koperasi adalah lembaga ekonomi berwatak “sosial.”

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu, kami memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **Good Coperative Governance dan eksternal Key Succes Factors, Pendekatan Terpadu dalam Rangka Revitalisasi Koperasi di kota Medan.**

1.3. Perumusan Masalah.

Sesuai dengan Identifikasi permasalahan, maka kami merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penghambat Revitalisasi Koperasi produksi di kota Medan, dan bagaimana pendekatan yang “sesuai”, dengan tetap mengacu pada Prinsip dan Nilai koperasi
2. Apa saja pendekatan edukatif dan psikologis yang akan digunakan dalam membangun Model Revitalisasi SDM Koperasi (diharap Finalisasi pada tahun ke-2). dapat mengurangi secara signifikan penghambat Revitalisasi koperasi di Medan.